

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Peran, seperti status, juga merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Dua konsep status dan peran berjalan beriringan. Sebuah peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu. ¹Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa.

Sutarto dalam Syaron *et al.*, mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu: ²

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

¹ Khaerul, Umam, Noer. 2021. Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar. Jakarta: E.perwatt.press. Hal:43

² Syaron, B., Lantaeda, F., Daicy J., & Lengkong, J.Ruru. 2018. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, VOLUME 04(048)

- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto yang dikutip oleh Syaron *et al.*, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut: ³

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

2.2. Keberadaan Perkebunan Karet

Perkebunan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi,

³ Ibid. Hal:3

alat, dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relative lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.⁴

Tanaman perkebunan yang merupakan sub sektor pertanian, dan jasa pertanian, memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selama periode 2013-2018, sub sektor ini memberikan kontribusi tertinggi dibanding dengan sub sektor lainnya yakni mencapai Rp. 1.375 Triliun dan nilai PDB sektor pertanian tahun 2018 naik 47% dibandingkan dengan tahun 2013. Komoditi karet alam adalah salah satu komoditi unggulan sub sektor perkebunan yang menjadi primadona ekspor Indonesia setelah kelapa dan minyak kelapa sawit. Tanaman karet dapat berproduksi sepanjang tahun di Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia cocok untuk ditanami karet (pulau Sumatera merupakan wilayah yang memberikan kontribusi tertinggi dalam produksi karet di Indonesia). Hal tersebut yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara produsen karet di dunia.⁵

Pembukaan perkebunan karet secara besar-besaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit demi kepentingan menambah 8 dana. Perusahaan Siciente Financiere des Caoutchoues dari Belgia pada tahun 1909 dan diikuti perusahaan Amerika yang bernama *Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij* (HAPM) pada tahun 1910- 1911 ikut menanamkan modal dalam membuka perkebunan karet di Sumatera. Harga karet pada tahun 1910-1911 menambah semangat para pengusaha perkebunan untuk mengembangkan usahanya. Perkebunan karet rakyat di Indonesia juga berkembang seiring naiknya permintaan karet dunia dan kenaikan harga. Hal-hal lain yang ikut menunjang dibukanya perkebunan karet rakyat di beberapa daerah antara lain karena pemeliharaan tanaman karet relatif

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

⁵ Ahmad, Soleh. 2018. Analisis Ekspor Dan Produksi Karet Di Indonesia (Aplikasi Model Lag Terdistribusi) .Jurnal Ekombis Review .

mudah dan rakyat mempunyai kepercayaan terhadap cerahnya masa depan perkebunan karet.

Di Indonesia, sebagian besar perkebunan yang ada merupakan perkebunan rakyat. Namun, petani rakyat sebagian besar tidak bisa menentukan besarnya pengeluaran, padahal karet memerlukan penanganan sebaik-baiknya agar menguntungkan. Penanganan yang baik bisa menaikkan produksi yang sekaligus bisa menaikkan pendapatan petani. Peningkatan produksi bisa dilakukan kapan saja, proses produksi meliputi beberapa istilah teknis yang perlu diperhatikan untuk mencapai produksi maksimal.

Dalam kegiatan pemasaran karet, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan pengamanan produksi, pemulihan kondisi, serta pemulihan kemandirian usaha. Dalam kegiatan kebun karet, diperlukan adanya strategi dari perusahaan kebun karet agar nantinya dalam melakukan kegiatannya tidak terjadi konflik dan juga tidak menimbulkan permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan. Pembahasan kali ini cenderung bagaimana agar dalam pengoperasiannya, perusahaan kebun karet dapat tetap memperhatikan permasalahan sosial yang dihadapi disekitar kebun karet. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi agar hubungan perusahaan kebun karet dan masyarakat dapat berjalan harmonis, dan permasalahan sosial dapat ditekan dan dapat dicarikan solusinya.

a. Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan Perusahaan punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat karena pada dasarnya melalui operasi penambangan dan kegiatan-kegiatan

pendukungnya telah terjadi pengambilalihan hak penguasaan sumberdaya milik penduduk setempat. Dalam memenuhi tanggung jawab sosial tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Perusahaan wajib menghormati dan mengakui hak penduduk atas sumberdaya dan lingkungan hidup
- 2) Harkat dan martabat, termasuk harkat politik masyarakat harus dihargai
- 3) Kesempatan harus diberikan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri

Kegiatan pengembangan masyarakat perlu dilakukan oleh perusahaan sedini mungkin, termasuk sebelum kegiatan penambangan itu dimulai. Penyiapan sumberdaya lokal secara dini akan memungkinkan masyarakat untuk dapat berinteraksi secara baik dengan perusahaan, termasuk memungkinkan tenaga kerja lokal dapat terserap dan berkembang dalam semua jenjang pekerjaan didalam perusahaan.

b. Tujuan Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial

Pemenuhan tanggung jawab Sosial perusahaan harus dilakukan sehingga dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

- 1) Memberdayakan masyarakat
- 2) Membangun daerah
- 3) Membina persatuan dan kesatuan bangsa

c. Pola Hubungan Kerja dalam Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat

Pola hubungan kerja harus dilakukan dengan melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan. Hubungan ketiga elemen ini harus setara, seimbang dan saling menguntungkan. Dan dalam menyusun program-program pembangunan, kerja sama ini harus terjalin sehingga pembagian tanggung jawab dapat dilakukan secara baik dan jelas.

d. Metode Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial

Dengan menyesuaikan dengan keadaan dilapangan dan isuisu sosial pokok yang dihadapi, maka perusahaan dapat melakukan tanggung jawab sosialnya melalui tiga cara yaitu secara langsung, tidak langsung dan terpadu.

e. Kebutuhan Informasi bagi Pemenuhan Tanggug Jawab Sosial

Agar nantinya dalam pemenuhan tanggung jawab sosial dapat terlaksana dengan baik dan terpau, maka diperlukan informasi-informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sosial yang ada. Informasi tersebut antara lain yaitu :

- 1) Struktur sosial dan kepemimpinan masyarakat
- 2) Pola-pola perekonomian masyarakat
- 3) Asrirasi dan ekspektasi masyarakat
- 4) Ketersediaan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
- 5) Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat

2.3. Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁶

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang perekonomiannya rendah, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.⁷ Dalam pemberdayaan mengandung terdapat dua kecenderungan. Pertama, proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, melakukan konsientisasi/conscientizatio. Konsientasi merupakan suatu proses pemahaman dan penumbuhan kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi, baik dalam kaitannya dengan relasi-relasi politik, ekonomi dan sosial.⁸ Pemberdayaan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan berupa akal budi, usaha untuk meningkatkan kemampuan komunitas atau kelompok masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat.⁹

⁶ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12)

⁷ Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal:21

⁸ Ibid. Hal:2

⁹ Fendi, M.Y. 2021. Metode Pemberdayaan Masyarakat. Jember: Polije Press: Hal:2

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “empowerment”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan.¹⁰ Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggung jawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan diatur oleh Pemerintah dalam wujud *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Menurut Muman Nuryana, CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian social dalam operasi bisnis mereka dan

¹⁰ Hendrawati, Hamid. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Maksiar: Dela Macca. Hal:9

dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.¹¹ *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan atas dampak dari keputusan dan aktivitas yang dilakukan, melalui perilaku yang etis dan transparan dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan stakeholder, dimana dalam pelaksanaannya memenuhi aturan yang berlaku dan konsisten terhadap norma internasional dan terintegrasi dalam keseluruhan bagian organisasi.

Sebagai kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.

2.3.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan upaya berkesinambungan yang terus menerus tidak terputus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk

¹¹ Okke Rosmaladewi. 2018. Manajemen Kemitraan Multistakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sleman : CV Budi Utama. Hlm. 10

mengembangkan daya (potensi) dan sumber daya (pusat kekuatan).¹² Menurut Soemodiningrat yang dikutip oleh Laras, dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.¹³

Menurut Ginandjar Kartasasmita, upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu :¹⁴

¹² Azam, Awang. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar:47

¹³ Laras, Hartono. 2017. *Pedoman Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal: 15

¹⁴ Ginandjar Kartasasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Dicisendo. Hlm 31

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.¹⁵
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembagalembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

¹⁵ Munawar, Noor.2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I (2).

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat

masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2.3.3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, peningkatan pembradayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, social dan politik.¹⁶

Menurut Mardikanto dan Poerwoko yang dikutip oleh Hendrawati, tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:¹⁷

- a. Perbaikan pendidikan (better education) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas

¹⁶ UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

¹⁷ Hendrawati, Hamid. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Maksiar: Dela Macca. Hal:13-14

pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

- b. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility) artinya, Seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan/keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.
- c. Perbaikan tindakan (better action) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya/buatan) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan tindakan yang semakin membaik
- d. Perbaikan kelembagaan (better institution) artinya, dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (bargaining position) yang kuat pada masyarakat
- e. Perbaikan usaha (better business) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha/bisnis yang

dijalankan. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat

- f. Perbaikan pendapatan (better income) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan (better environment) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
- h. Perbaikan kehidupan (better living) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat (better community) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

2.3.4. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Aswas yang dikutip oleh Hendrawati, dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat/agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep

pemberdayaan. Beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi:¹⁸

- a. Pemberdayaan dilaksanakan dengan penuh demokratis, penuh keikhlasan, tidak ada unsur paksaan, karena setiap masyarakat mempunyai masalah, kebutuhan, dan potensi, sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk diberdayakan
- b. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya berdasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi yang dimiliki kelompok sasaran. Hal ini dapat diketahui dengan jelas jika proses identifikasi dan sosialisasi pada tahap awal berlangsung dengan melibatkan penuh kelompok sasaran.
- c. Sasaran utama pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga harus diposisikan sebagai subjek/pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, dan menjadi dasar utama dalam menetapkan tujuan, pendekatan, dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan.
- d. Menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti jiwa gotong royong, yang muda menghormati orang yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, karena hal ini menjadi modal sosial dalam pembangunan.
- e. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, karena merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, dilakukan secara logis dan sederhana menuju ke hal yang lebih kompleks.

¹⁸ Hendrawati, Hamid. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Maksar: Dela Macca. Hal:17-19

- f. Memperhatikan keragaman karakter, budaya dan kebiasaankebiasaan masyarakat yang sudah mengakar atau berlangsung lama secara turun temurun
- g. Memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek sosial dan ekonomi
- h. Tidak ada unsur diskriminasi, utamanya terhadap perempuan
- i. Selalu menerapkan proses pengambilan keputusan secara partisipatif, seperti penetapan waktu, materi, metode kegiatan dan lain-lain
- j. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) maupun non fisik (saran, waktu, dukungan). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Pemberdayaan Masyarakat
- k. Aparat/agen pemberdayaan bertindak sebagai Fasilitator yang harus memiliki kemampuan/kompetensi sesuai dengan potensi, kebutuhan, masalah yang dihadapi masyarakat. Mau bekerjasama dengan semua pihak/institusi maupun lembaga masyarakat /LSM yang terkait.

2.4. Kerangka Berpikir

Kerangka teoritis (pemikiran) merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang menjadi acuan penelitian yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan

solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan, disusun dalam bentuk matrik, bagan atau gambar.¹⁹

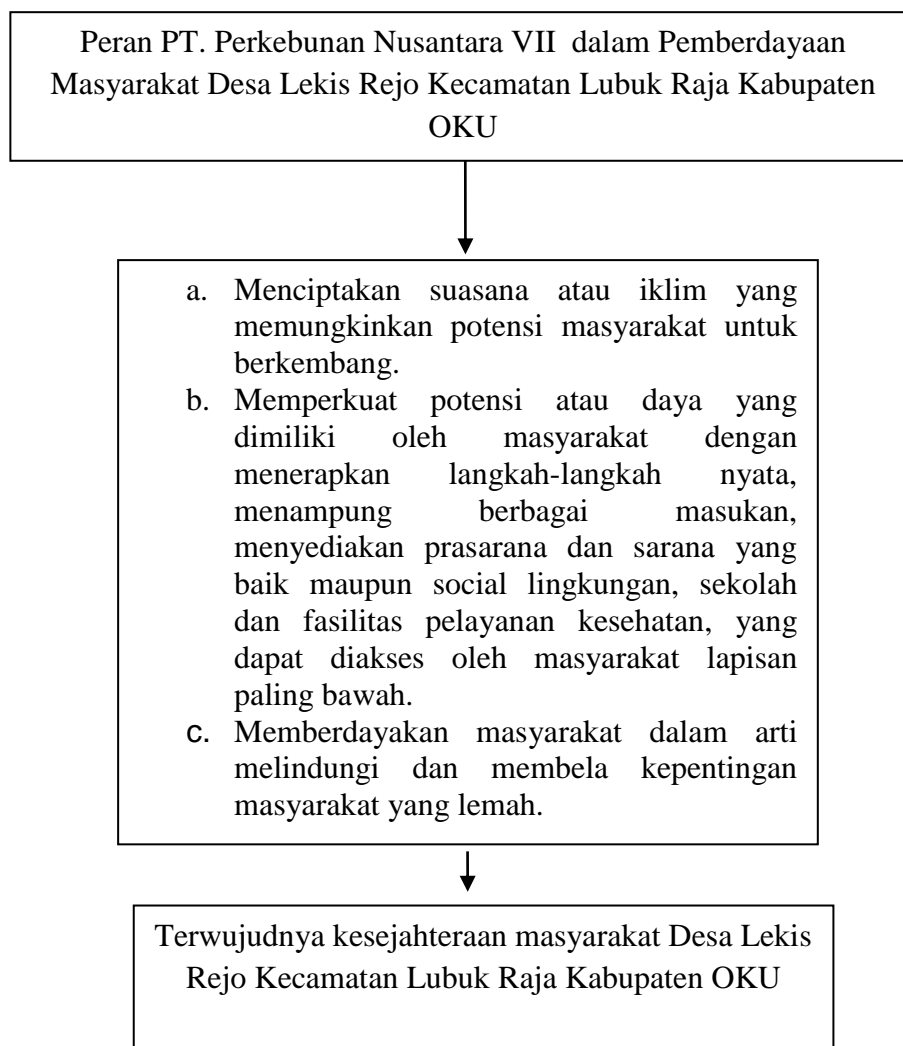
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perkebunan karet dalam pemberdayaan masyarakat Desa Lekis Rejo Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan teori dari Kartasasmita yang mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik (irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah, Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah.

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VII dalam pemberdayaan masyarakat Desa Lekis Rejo Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu guna meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Lekis Rejo Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bekerja sebagai petani karet baik itu Plasma maupun Swadaya, meliputi Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana yang baik fisik

¹⁹ Azhari Akmal Tarigam, et.al., Pedoman Pemilihan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), h.17.

(irigasi, jalan dan listrik), maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah.

Analisis tersebut akan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Bagan 2.2 Kerangka Pikir